

## Analisa Kebijakan Publik Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional

Nancy Sofiani<sup>1</sup>, Tio Saputra<sup>2</sup>✉, Syamsir<sup>3</sup>, Aldri Frinaldi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Correspondence Author: [putratio1995@gmail.com](mailto:putratio1995@gmail.com)✉

### Article History

Received : 2023-01-22

Accepted : 2023-03-13

Published : 2023-04-01

### Keywords:

Public Policy,  
Management,  
Traditional Market

**Abstract:** Public policy analysis of traditional market management is the aim of writing this article. This traditional market management policy is part of a public policy established to measure and supervise traditional market management. This article was prepared using the literature review method in which the author assessed the results of previous studies which were made in the form of articles published in various national online restriction journals and then analyzed materials related to public policy on traditional market management. The results of the analysis show that the implementation of traditional market management policies can help create a healthier and more productive market environment for traders and visitors. However, this policy must also pay attention to the social, economic and environmental impacts that may arise and must constitute a target or objective of a government program, so that it is made at a higher level up to the technical level. Aims to increase the economic growth of the community. The expected result of these activities is the availability of economic facilities as a forum to move and grow the regional economy so that the community's economic activities can develop properly and open up employment opportunities.

**Abstrak:** Analisis kebijakan publik terhadap pengelolaan pasar tradisional merupakan tujuan dari penulisan artikel ini. Kebijakan pengelolaan pasar tradisional ini ialah bagian dari sebuah kebijakan publik yang dibentuk untuk mengukur serta mengawasi pengelolaan pasar tradisional. Artikel ini dibuat dengan metode literature review dimana penulis mengevaluasi hasil penelitian-penelitian terdahulu yang dibuat dalam bentuk artikel yang di publikasi diberbagai jurnal online berskala nasional kemudian di analisa bahan yang berhubungan dengan kebijakan publik terhadap pengelolaan pasar tradisional. Hasil analisa menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional dapat membantu menciptakan lingkungan pasar yang lebih sehat dan produktif bagi para pedagang dan pengunjung. Namun, kebijakan ini juga harus memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin timbul serta seharusnya merupakan suatu sasaran atau tujuan dari program pemerintah, sehingga dibuat dalam level yang lebih tinggi sampai level teknis. Bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah tersedianya sarana perekonomian sebagai salah satu wadah untuk menggerakkan dan menumbuhkan ekonomi wilayah sehingga kegiatan ekonomi masyarakat dapat berkembang dengan baik serta terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan.



Available online at  
<http://jim.unsyiah.ac.id/sejarah/>

### PENDAHULUAN

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh

pemerintah atau institusi publik untuk mengatasi masalah atau memecahkan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kebijakan publik dapat berupa keputusan

atau tindakan yang diambil untuk menetapkan tujuan, sasaran, atau standar yang harus dicapai oleh pemerintah atau masyarakat, serta mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan publik dapat berdampak pada kehidupan masyarakat secara luas dan mempengaruhi berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan keamanan. Proses pembuatan kebijakan publik melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi masalah, perumusan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan untuk mengevaluasi apakah kebijakan yang diambil telah mencapai tujuan yang diinginkan.

Pengelolaan pasar adalah serangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola kegiatan jual-beli di pasar agar dapat berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan pasar meliputi berbagai aspek, seperti pengaturan tata letak pasar, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, penentuan jam operasional pasar, dan pengawasan terhadap keamanan dan kualitas barang yang dijual. Kebijakan publik, di sisi lain, adalah berbagai kegiatan atau keputusan dari pemerintah atau institusi publik agar mengatasi masalah atau memecahkan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam konteks pengelolaan pasar, kebijakan publik dapat mempengaruhi cara pengelolaan pasar dilakukan, seperti melalui regulasi, pengawasan dan penegakan hukum, pemberian insentif, atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pasar. Kebijakan publik juga dapat mendorong perubahan dalam cara pengelolaan pasar, seperti meningkatkan akses pasar bagi kelompok masyarakat tertentu, memperkuat kerja sama antara pemerintah dan pedagang, atau mengurangi dampak lingkungan dari pengelolaan pasar. Dengan demikian, pengelolaan pasar dan kebijakan publik saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam upaya untuk menciptakan pasar yang sehat, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Definisi kebijakan publik dalam pengelolaan pasar tradisional merupakan gabungan langkah bisa juga tindakan

pemerintah maupun lembaga publik supaya bisa mengatur, mengelola, dan mengembangkan pasar tradisional dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Kebijakan publik dalam pengelolaan pasar tradisional melibatkan perumusan, implementasi, dan evaluasi berbagai langkah dan instrumen kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, dan keadilan dalam operasional pasar tradisional. Kebijakan publik ini dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pedagang, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Kebijakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi tingkat harga di pasar. Harga yang terlalu tinggi, akan membuat beralih ke pasar lain atau mencari produk yang lebih murah di pasar gelap. Kebijakan perdagangan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempengaruhi arus barang dan jasa di pasar seperti pengenaan bea masuk, kuota impor, dan regulasi lainnya yang dapat membatasi atau mempermudah impor atau ekspor barang. Jika kebijakan perdagangan yang diterapkan terlalu proteksionis, maka hal ini dapat memicu peningkatan harga dan penurunan kualitas produk. Kebijakan sanitasi dan keamanan pangan yang diterapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan produk yang diperjualbelikan di pasar. Kurangnya keketatan berpotensi terjadi penjualan produk yang tidak aman dan berbahaya bagi konsumen. Kebijakan pembangunan infrastruktur dapat mempengaruhi aksesibilitas dan mobilitas di pasar yang jika sulit dapat memengaruhi penjualan produk. Kebijakan pajak yang diterapkan juga dapat mempengaruhi harga produk yang diperjualbelikan di pasar. Dalam menghadapi permasalahan ini, pengelola pasar dapat berusaha berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyepakati solusi yang terbaik bagi semua pihak. Pengelola pasar juga dapat memperkuat hubungan dengan produsen dan konsumen untuk memastikan kebutuhan semua pihak terpenuhi.

Sementara jika dilihat dari kebijakan publik juga dapat mempengaruhi pengelolaan pasar ada terdapat beberapa masalah seperti,

regulasi bertentangan dengan aturan yang berlaku dipasar, ketidakadilan yang dapat merugikan pihak tertentu di pasar, seperti pengusaha kecil dan menengah yang kesulitan memenuhi persyaratan yang diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan publik yang kurang responsif terhadap perubahan situasi dan kondisi di pasar dapat menyebabkan ketidakcocokan antara kebijakan yang diterapkan dan kebutuhan di pasar. Biaya Tinggi dapat memberatkan pengelola pasar dan produsen, terutama mereka yang berasal dari kalangan kecil dan menengah serta, kebijakan publik yang kurang terkoordinasi antara lembaga pemerintah dapat menyebabkan ketidakjelasan dan konflik kebijakan. Hal ini dapat menghambat efektivitas kebijakan yang diterapkan dan memicu ketidakpastian di pasar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah harus berusaha untuk memastikan kebijakan yang diterapkan secara konsisten, adil, dan responsif terhadap perubahan di pasar. Pemerintah juga harus berusaha untuk meminimalkan biaya kebijakan dan memperkuat koordinasi antara lembaga pemerintah untuk memastikan keselarasan dan keterpaduan kebijakan yang diterapkan. Selain itu, pemerintah dapat membuka dialog dan konsultasi dengan pengelola pasar dan produsen untuk memahami kebutuhan di pasar dan menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak.

Seharusnya kebijakan publik dapat mempengaruhi pengelolaan pasar dengan mengeluarkan aturan dan regulasi untuk mengatur pengelolaan pasar agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diinginkan, seperti transparansi, persaingan yang sehat, dan perlindungan konsumen. Memberikan subsidi atau bantuan kepada para pedagang agar dapat mengakses pasar dengan lebih mudah dan terjangkau, turut membantu penataan dan pengembangan infrastruktur pasar, seperti pembangunan gedung pasar yang memadai, penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai, dan fasilitas parkir yang memadai. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum dipasar, seperti melakukan pengawasan terhadap praktik bisnis yang tidak etis dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan

para pedagang. Artikel ini di buat untuk memberikan gambaran tentang bentuk Analisa kebijakan publik terhadap pengelolaan pasar, sehingga dapat ditentukan kebutuhan serta solusi - solusi dari permasalahan yang muncul.

## **KAJIAN TEORI**

Pasar tradisional adalah suatu bentuk pasar yang telah ada sejak lama dan memiliki ciri khas budaya dan tradisi lokal. Pasar ini merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli berbagai macam barang dagangan seperti makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan produk lainnya. Pasar tradisional memiliki ciri-ciri seperti biasanya terletak di daerah perkotaan atau pedesaan, seringkali menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Pasar ini dapat berada di bangunan permanen atau sementara, seperti lapak-lapak yang didirikan di pinggir jalan. Dikelola oleh pedagang-pedagang kecil yang umumnya merupakan warga setempat. Mereka biasanya memiliki kios atau lapak sendiri untuk menjual barang dagangan mereka. Menawarkan berbagai jenis produk, termasuk makanan segar, sayuran, buah-buahan, daging, ikan, rempah-rempah, pakaian, kain, peralatan rumah tangga, dan barang-barang kebutuhan sehari-hari lainnya. Bukan hanya tempat untuk bertransaksi, tetapi juga tempat di mana masyarakat lokal dapat bertemu, berinteraksi, dan berbagi informasi. Hal ini menciptakan suasana yang hidup dan ramai di pasar tradisional. Pembeli seringkali memiliki kebebasan untuk menawar harga dengan pedagang. Negosiasi harga adalah praktik umum yang memungkinkan pembeli untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Sering menjadi simbol keberlanjutan budaya dan identitas suatu komunitas. Pasar ini sering dipertahankan dan dijaga agar tetap eksis, meskipun adanya persaingan dari pasar modern. Pasar tradisional memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Selain sebagai tempat berbelanja, pasar tradisional juga berperan dalam mempertahankan kearifan lokal, mendukung usaha mikro dan kecil, serta menjaga keberagaman produk lokal.

Pengelolaan pasar adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat sekitar untuk mengelola pasar agar dapat berjalan efektif, efisien, dan berdaya saing. Pengelolaan pasar meliputi berbagai aspek, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Dalam (Rasmita, 2021) pada pembangunan dan pengelolaan sebuah pasar, perlunya sebuah manajemen tata kelola pasar yang baik dalam mewujudkan sebuah pasar yang tertib, sehat, aman, bersih dan teratur. Tujuan dari pengelolaan pasar adalah untuk meningkatkan kualitas pasar, memenuhi kebutuhan konsumen, mendukung perkembangan ekonomi, dan memastikan keselamatan dan keamanan pedagang dan pengunjung pasar. Pengelolaan pasar yang baik akan dapat menciptakan pasar yang bersih, tertib, aman, dan nyaman bagi pedagang dan masyarakat sekitar.

Kebijakan pasar tradisional merujuk pada serangkaian aturan, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengatur operasional pasar tradisional. Pasar tradisional sendiri merupakan tempat transaksi jual-beli yang sudah ada sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Kebijakan pasar tradisional biasanya mencakup berbagai aspek, seperti pengaturan tata letak pasar, regulasi pembukaan toko, pengelolaan sampah, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan kualitas produk yang dijual di pasar tradisional. Dalam (Aini, 2019) dikatakan perlu dicatat bahwa tujuan kebijakan pasar tradisional dapat bervariasi tergantung pada konteks lokal dan kebutuhan masyarakat, yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi, peningkatan kualitas produk dan pelayanan, pelestarian budaya dan identitas lokal, peningkatan aksesibilitas dan ketersediaan, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, peningkatan partisipasi dan pengambilan keputusan, untuk mengatur keperluan di berbagai aspek yang terkait. Tujuan dari kebijakan pasar tradisional adalah untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para pedagang dan konsumen pasar tradisional, serta meningkatkan

kontribusi pasar tradisional terhadap perekonomian lokal.

Kebijakan publik dapat sangat mempengaruhi pengelolaan pasar tradisional. Kebijakan publik adalah keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kepentingan publik dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat. Ditekankan dalam (Maulidin, 2021) tingkat ketepatan keputusan sebuah kebijakan tergantung pada ketepatan dalam merumuskan masalah publik yang ingin dipecahkan. Dalam (Anggreini, 2018) secara luas segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah suatu kebijakan publik. Dilengkapi oleh (Ramadhani, 2022) dalam artikelnya apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya. Dikatakan dalam (Jumanah, 2019) pengetahuan dan pelaksanaan administrasi publik dalam konteks kebijakan publik ialah satu dari beberapa dimensi pokok yang penting. Dalam (Yulita, 2019) dinyatakan Perda maupun PP yang diterbitkan disesuaikan dengan kebijakan. PP yang diterbitkan akan menyatukan seluruh bentuk aturan Perda maupun Permen yang dikeluarkan dalam terlaksananya blue print dengan tujuan mencapai harapan dan kepentingan masyarakat luas.

Kemudian lebih spesifik dalam (Anggreini, 2018) dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian proses dari pengambilan keputusan hingga tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan setiap keputusan ataupun tindakan yang dilakukan memiliki dampaknya masing-masing. Sedangkan, kebijakan pengelolaan pasar tradisional mencakup keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola pasar untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan keberlangsungan pasar tradisional. Dalam (Sudrajat, 2018) setiap pelaksanaan dan perumusan perencanaan yang di canangkan oleh dinkop, UKM, kelompok dagang maupun perindustrian dalam pengelolaan pasar tradisional hendaknya dapat di satukan dan di wadahi dengan kebijakan publik yang di lahirkan oleh pemerintahan karena kebijakan dapat memberikan arah, aturan, dan panduan bagi pengelolaan pasar tradisional, serta

menjadi dasar dalam perumusan strategi dan rencana tindakan yang dilakukan oleh instansi terkait. Dengan kebijakan publik yang berperan sebagai landasan untuk mengarahkan upaya pengelolaan pasar tradisional. Dengan adanya kebijakan yang baik dan konsisten, instansi terkait dapat merumuskan strategi dan melakukan implementasi yang efektif untuk meningkatkan kualitas, keberlanjutan, dan keberhasilan pasar tradisional.

Dalam menjalankan kebijakan publik, pemerintah harus memperhatikan dampak kebijakan tersebut terhadap pasar tradisional. Kebijakan publik yang baik harus mencakup perhatian yang serius terhadap pengelolaan pasar tradisional, mengingat pasar tradisional berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam hal pangan dan bahan pokok. Pemerintah juga harus berkolaborasi dengan pengelola pasar tradisional dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pengelolaan pasar tradisional secara berkelanjutan dan produktif. Dalam (Magdina, 2018) adanya kebijakan pemerintah tentang pembatasan pasar modern dan revitalisasi pasar tradisional sangat berkaitan, karena pembatasan pasar modern tanpa adanya revitalisasi pasar tradisional adalah sama halnya dengan menyelesaikan masalah, namun tidak sampai ke akarnya.

## **METODE**

Tulisan ini merupakan literature review dari artikel penelitian. Literature review sebuah proses atau bentuk penulisan yang dilakukan dengan menyusun, mengevaluasi, kemudian dilakukannya sintesis kritis bersumber dari berbagai literatur yang sejalan dengan tujuan penulisan atau masalah riset tertentu. Literature review melibatkan pencarian, pengumpulan, dan analisis literatur yang telah dipublikasikan, seperti jurnal ilmiah, buku, tesis, dan artikel lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Tinjauan pada penulisan artikel ini menggunakan metode evaluasi yang diawali dengan pertanyaan penelitian

“bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional”. Pengelolaan pasar tradisional merupakan kata kunci dalam pencarian artikel melalui Google Scholar. Dalam artikel ini publikasi yang digunakan yaitu terbit 20 tahun terakhir bisa disebutkan dari 2003 hingga 2023, bisa di akses maupun judul dan isinya dan sesuai dengan tujuan penulisan serta mempunyai kaitan dengan tema penulisan yaitu kebijakan pengelolaan pasar tradisional. Hal ini penting dan perlu diperhatikan demi kemutakhiran serta kebaruan pengambilan database.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional dapat terkait erat dengan kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan pengelolaan pasar tradisional dapat menjadi salah satu bentuk kebijakan publik yang mengatur dan mengawasi pengelolaan pasar tradisional. Beberapa contoh kebijakan publik yang terkait dengan pengelolaan pasar tradisional seperti, kebijakan regulasi, kebijakan fasilitasi, kebijakan promosi, dan kebijakan penanganan konflik. Implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional dapat membantu menciptakan lingkungan pasar yang lebih sehat dan produktif bagi para pedagang dan pengunjung. Namun, kebijakan ini juga harus memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin timbul. Dalam artikelnya (Sudrajat, 2018) menyatakan pemerintahan membuat sebuah program hendaknya bertujuan untuk lebih baiknya kebijakan pengelolaan pasar tradisional dengan tingkatan program yang lebih spesifik dan terperinci sehingga sasaran itu dapat dicapai. Dalam (Darmawan, 2015) Implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan sejumlah regulasi diantaranya Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 yang meliputi upaya mengelola dan memberdayakan pasar tradisional untuk menghasilkan pasar yang tertib, bersih, aman dan sehat, peningkatan layanan bagi masyarakat, peningkatan ekonomi dan daya saing pasar tradisional terhadap pasar

modern. (Aini, 2019) bertumbuhnya kemampuan ekonomi pada masyarakat merupakan tujuan dari kebijakan pengelolaan pasar tradisional. Diharapkan dengan adanya kebijakan pengelolaan pasar tradisional adanya tempat dalam masyarakat menjalankan dan meningkatkan derajat perekonomian di daerahnya aung dengan kegiatan perekonomian itu masyarakat bisa berkembang dan membuka banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat itu sendiri agar turut membantu dalam menumbuhkan perekonomian daerahnya.

Implementasi kebijakan publik dapat berdampak langsung terhadap pengelolaan pasar tradisional. Kebijakan publik dapat mempengaruhi cara pengelolaan pasar tradisional, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada bentuk dan substansi kebijakan tersebut. Dalam hal ini, implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional dapat terkait dengan implementasi kebijakan publik yang lebih luas, seperti kebijakan perdagangan, kebijakan ekonomi, kebijakan Kesehatan dan kebijakan lingkungan. Dalam penelitian (Jumanah, 2019) di dapati kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Penelitian (Yulita, 2019) menemukan hasil ada berbagai aspek yang menyebabkan belum maksimalnya pengelolaan pelaksanaan perencanaan kebijakan publik sektor pasar tradisional yaitu kurangnya dukungan untuk Perda yang diterbitkan, dimana dalam Perda tersebut diatur tata laksana pasar tradisional dan aturan-aturan tertentu tentang pasar modern sehingga bisa saling di imbangi dan mengimbangi serta ketransparansian tata kelola yang dilaksanakan secara online.

Dijelaskan beberapa variabel dalam implementasi pengelolaan pasar pada artikenya (Ramadhani, 2022) yaitu, seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan pasar harus di ikut sertakan dan mengetahui segala bentuk keputusan maupun kebijakan tentang penyusunan maupun pelaksanaan Perda maupun PP tentang kebijakan pengelolaan

pasar sehingga keefektif dan efesiensian dari pengimplementasian kebijakan publik ini bisa dilakukan. Hal penting lain yang dibutuhkan dalam suksesnya pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar tradisional ialah sumber daya alam maupun manusianya. Sumber daya manusia terkenal dengan sikapnya yang bermacam-macam sehingga kecenderungannya dalam berperilaku untuk melaksanakan kebijakan berpengaruh besar dalam terwujudnya pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar Induk Amuntai seiring dengan target kebijakan publik itu sendiri. Sikap jujur dan komitmen merupakan sikap yang harus dimiliki dan di pertahankan oleh pelaksana kebijakan sehingga bisa tetap berada dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam program demi terlaksananya tugas dan wewenang, fungsi serta tanggung jawab yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Disamping itu ada pula hal-hal yang menyebabkan suatu kebijakan tidak dapat terlaksana dengan baik yaitu struktur dari birokrasi pemerintahan, sehingga perlu juga hendaknya untuk diperhatikan dengan baik.

Pelaksanaan kebijakan publik terhadap pengelolaan pasar tradisional melibatkan serangkaian tindakan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk menerapkan kebijakan tersebut. Ada beberapa penjelasan mengenai pelaksanaan kebijakan publik terhadap pengelolaan pasar tradisional dari identifikasi masalah dan tujuan yang merupakan tahap awal pelaksanaan kebijakan adalah mengidentifikasi masalah yang ada dalam pengelolaan pasar tradisional. Misalnya, masalah kebersihan, keamanan, infrastruktur yang rusak, atau kurangnya daya saing pasar tradisional. Setelah itu, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut, seperti meningkatkan kualitas pasar, meningkatkan pendapatan pedagang, atau memperkuat daya saing pasar tradisional. Perumusan kebijakan tahap dua dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar tradisional melibatkan proses merumuskan aturan, regulasi, dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut dapat

mencakup aspek seperti regulasi kebersihan, perbaikan infrastruktur, pengembangan kapasitas pedagang, atau program promosi pasar tradisional. Implementasi kebijakan, setelah kebijakan dirumuskan, tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan tersebut. Hal ini melibatkan penerapan aturan, alokasi sumber daya, dan tindakan konkret yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Implementasi kebijakan dapat mencakup pemantauan aktivitas pasar, inspeksi kebersihan, penyediaan fasilitas infrastruktur yang diperlukan, pelatihan dan pendidikan pedagang, serta promosi pasar tradisional. Koordinasi dan kolaborasi, pelaksanaan kebijakan publik dalam pengelolaan pasar tradisional sering melibatkan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian, asosiasi pedagang, dan komunitas lokal. Kolaborasi ini penting untuk mencapai sinergi dan memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi hasil implementasi kebijakan. Hal ini melibatkan pemantauan terhadap dampak kebijakan terhadap pengelolaan pasar tradisional, termasuk perbaikan kualitas pasar, peningkatan pendapatan pedagang, atau partisipasi masyarakat dalam pasar tradisional. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi keberhasilan kebijakan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Pelaksanaan kebijakan publik terhadap pengelolaan pasar tradisional harus memperhatikan karakteristik pasar tradisional yang unik, kebutuhan pedagang dan masyarakat lokal, serta berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.

Didapati dalam artikelnya (Maulidin, 2021) mengatakan Public Policy dalam Pengelolaan Pasar dilakukan beberapa kebijakan yang antara lain penyediaan fasilitas atau utility, revitalisasi fisik dan non fisik serta pembentukan wadah-wadah komunikasi yang berbentuk organisasi informal. Upaya pembentukan organisasi organisasi informal seperti paguyuban pedagang, pembentukan bank sampah oleh paguyuban pedagang pasar serta pendirian Radio Land Suara Pasar yang juga merupakan produk kegiatan paguyuban

pedagang pasar merupakan salah satu wujud implementasi kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah. (Choerudin, 2018) menyatakan dalam penelitiannya, bahwa kebijakan pemerintah dengan menggunakan administrasi publik yang menghasilkan kebijakan yang berkaitan dengan people, industry, institusi, intermediasi, dan sumber daya serta teknologi dapat mempercepat perkembangan pasar tradisional. Dalam (Darmawan, 2015) implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan kebijakan.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan pengelolaan pasar tradisional merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang mengatur dan mengawasi pengelolaan pasar tradisional seperti, kebijakan regulasi, kebijakan fasilitasi, kebijakan promosi, dan kebijakan penanganan konflik. Implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional dapat membantu menciptakan lingkungan pasar yang lebih sehat dan produktif bagi para pedagang dan pengunjung. Namun, kebijakan ini juga harus memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin timbul serta, kebijakan pengelolaan pasar tradisional hendaknya disusun dalam tingkatan yang lebih spesifik hingga yang lebih terperinci sehingga bisa menjadi sebuah sasaran dari program pemerintahan dalam terciptanya perekonomian masyarakat yang meningkat dan terus bertumbuh. Pasar tradisional yang dikelola dengan baik hendaknya menghasilkan sarana perekonomian yang bisa dijadikan sebagai wadah dalam menggerakkan dan menumbuhkan perekonomian di daerah tersebut, terbukanya lapangan kerja sebagai sebuah nilai tambah dari kebijakan publik tentang pengelolaan pasar tradisional. Terbentuknya masyarakat dengan

perekonomian yang baik dan kuat dalam menghadapi globalisasi.

## REFERENSI

- Ramadhani, Haji Mukti ; V. Rudy Handoko ; Endang Indartuti. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara). Tesis. Repositoty Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- Yulita dan Cakti Indra Gunawan. (2019). Model Strategi Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pasar Tradisional Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat. REFERENSI ; Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi. Volume 7 Nomor 1. hal 37-45
- Magdina, Tengku Maya ; M. Arif Nasution ; Husni Thamrin. (2018). Evaluasi Kebijakan Revitalisasi dalam Pengelolaan Pasar Tradisional oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*. Volume 4 Nomor 1. hal 45-52
- Sudrajat, Arip Rahman ; Asep Sumaryana ; Rd. Ahmad Buchari ; Tahjan. (2018). Perumusan Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*. Volume 6 Nomor 1. hal 53-67
- Rasmita ; Achmad Aminudin ; Loesida Roeliana. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Panorama Di Kota Bengkulu. *Jurnal Dinamika Manajemen Dan Kebijakan Publik*. Volume 1 Nomor 1. hal 25-31
- Jumanah ; Natta Sanjaya ; Ipah Mulyani. (2019). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 10 Nomor 2. hal 154-174
- Aini, Dini Noor dan Hasan Muchtar Fauzi. (2019). Analisis Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Di Kabupaten Situbondo. *Cermin : Jurnal Penelitian*. Volume 3 Nomor 2. hal 142-158
- Choerudin, Achmad ; Septiana Novita Dewi ; Aris Tri Haryanto ; Ifah Latifah. (2018). MODEL Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Partisipasimasyarakat: Studi Empiris Di Indonesia. *Prosiding SENDI*. hal 504-510
- Darmawan, Deni. (2015). Faktor Komunikasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional (Suatu Studi di Kota Pontianak). *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*. Volume 20 Nomor 2. hal 1-6
- Maulidin, Alifia ; Siti Marwiyah ; Avita Khoirunnafiyah. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kota Probolinggo. *Journal of Innovation Research and Knowledge*. Volume 1 Nomor 7. hal 293-300
- Anggreini, Andreina Putri. (2018). Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Pemberdayaan Pedagang Pasar Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Tesis. Repositoty Universitas Airlangga